

	<p><i>Home of Management and Bussiness Journal</i> (HOMBIS) http://ejournal.unimugo.ac.id/HOMBIS</p>	<p><i>Vol. 2 No. 1</i> (2023)</p>
---	--	--

ANALISIS KASUS PENYALAHGUNAAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK OLEH RAFAEL ALUN TRISAMBODO

Rizky Nur Cahyani¹, Sinta Etnika², Hita Nareswari³, Novia Evelynna⁴, Wisanggeni Bagus Anggoro⁵

Program Studi Manajemen, Universitas Muhammadiyah Gombong, Kebumen, Indonesia.

Corresponding Author: rizkynurcahyani38@gmail.com

DOI:

ABSTRAK

Latar belakang kasus ini yaitu dimula dengan penganiayaan oleh Mario Dandy dan menampilkan gaya hidup hedonism di media sosialnya. Hal tersebut menimbulkan kecurigaan terkait adanya penggelapan dana yang dilakukan oleh ayah Mario Dandy yaitu Rafael Alun yang merupakan seorang pejabat pajak senior. Yang mana salah satu harta yang dipamerkan di media social berupa Jeep Rubicon ternyata terdaftar atas nama orang lain untuk menghindari pajak. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai pajak senior Rafael Alun. Serta upaya yang dapat dilakukan oleh Lembaga Perpajakan untuk mencegah dan memberantas tindak pencucian uang dan korupsi di lingkungan Lembaga Perpajakan supaya kejadian serupa tidak terulang. Metode penelitian yang digunakan yaitu studi kasus yang mana kita meneliti lebih lanjut beberapa artikel tentang kasus tersebut, kemudian digunakan untuk mengidentifikasi berbagai masalah dan menentukan masalah yang menjadi masalah utama dari kasus yang sedang diteliti tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa benar adanya tindakan korupsi, pencucian uang dan tidaktaat pajak.

Kata kunci: pajak, korupsi, pencucian uang

ABSTRACT

The background to this case is that it began with Mario Dandy's persecution and displaying a lifestyle of hedonism on his social media. This raises suspicions regarding the embezzlement of funds committed by Mario Dandy's father, Rafael Alun, who is a senior tax official. Which one of the assets exhibited on social media in the form of a Jeep Rubicon turned out to be registered in the name of another person to avoid taxes. The purpose of this research is to analyze the violations committed by senior tax official Rafael Alun. As well as efforts that can be made by the Taxation Institution to prevent and eradicate acts of money laundering and corruption within the Taxation Institution so that similar incidents do not recur. The research method used is a case study in which we further examine several articles about the case, then used to identify various problems and determine the problem that is the main problem of the case being studied. The results showed that there were true acts of corruption, money laundering and tax disobedience.

Keywords: tax, corruption, money laundering

PENDAHULUAN

Di Indonesia kasus korupsi dan pencucian uang sudah tidak asing lagi didengar. Korupsi dan pencucian uang sudah mengakibatkan banyaknya perusahaan-perusahaan, pemerintah, dan masyarakat yang dirugikan. Dampak korupsi dan pencucian uang menimbulkan turunnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, penurunan produktivitas, menurunnya pendapatan negara dari sector pajak, dan meningkatnya hutang negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, Yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Terdapat definisi lain tentang korupsi yaitu perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang sogok, dan sebagainya (WJS Poerwardaminta : 1976). Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.

Penyelewengan kekuasaan baru baru ini dilakukan oleh Jenderal Pajak yang bernama Rafael Alun Trisambodo. Rafael diduga melakukan pencucian uang sebesar 50 miliar. Juru bicara KPK bidang penindakan yaitu Ali Fikri menyebutkan bahwa nantinya hal tersebut akan dikembangkan dalam penyelesaian dugaan kasus pencucian uang ini bermula dari tindakan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak Rafael Alun Triambodo yang bernama Mario Dandy. Selain kasus penganiayaan Mario Dandy juga melakukan aksi pamer kekayaan di media social. Hal tersebut menimbulkan kecurigaan KPK terhadap harta kekayaan yang tidak wajar. Rafael Alun terbukti melakukan pencucian uang yang pada praktiknya tindakan pencucian uang tersebut melibatkan 6 perusahaan serta satu perusahaan konsultan pajak. Terdapat dugaan bahwa Rafael mempunyai saham di perusahaan dan konsultan pajak tersebut.

Harta yang dimiliki Rafael Alun lebih tinggi dari Dirjen Pajak maupun dari Menteri Keuangan. Harta kekayaan yang dimiliki melebihi harta kekayaan atasannya yaitu Suryo Utomo dan hamper sama dengan Menteri Keuangan yaitu Sri Mulyani. Fakta lain menunjukkan bahwa ada beberapa asset kekayaan yang tidak sesuai dengan yang dilaporkan pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKhidupPN). Indikasi pencucian uang karena ada beberapa asset hasil korupsi yang diatasnamakan orang lain. Telah dilakukan pemberhentian aliran dana ke puluhan rekening yang berkaitan dengan Rafael dengan nilai transaksi mencapai ratusan miliar rupiah. Selain itu, Rafael juga terbukti sebagai pribadi yang tidak taat pajak, dan gaya pribadi serta keluarganya tidak sesuai dengan asas kepatutan dan kepatantasan sebagai seorang ASN. Pada

akhirnya, Rafael Alun dipecat secara tak hormat pada tanggal 8 Maret 2023 dengan jabatan terakhirnya yaitu sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP.

Terdapat beberapa kejanggalan harta dan laporan kekayaan Rafael, diantaranya yaitu mobil Rubicon yang digunakan oleh Mario Dandy ternyata atas nama orang lain yang bertempat tinggal di bilangan Jakarta Selatan, Harley Davidson yang digunakan oleh Mario Dandy tidak memiliki surat resmi, rumah besar milik Rafael di Manado atas nama istri rafae hanya dikenakan pajak sebesar Rp326.000, KPK juga pernah menerima laporan kejanggalan harta Rafael pada 2012 silam, selain itu Rafael juga termasuk ke dalam pejabat daftar merah (yang disinyalir berisiko tinggi hartanya bermasalah) di Kementerian Keuangan.

Buntut dari tindakan yang dilakukan Rafael Alun tidak hanya berimbas ke dirinya sendiri maupun ke pihak keluarganya tetapi juga berimbas kepada penurunan kinerja perpajakan. Hal tersebut terjadi karena masyarakat menilai dari adanya kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak dari Rafael Alun yang merembet ke dugaan adanya harta tak wajar yang dimiliki oleh Rafael Alun sehingga berakibat tergerusnya kepercayaan masyarakat terhadap Ditjen Pajak Kemenkeu. Menurut Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar, beliau berkata bahwa untuk mengembalikan kepercayaan public terhadap Kementerian Keuangan maka perlu adanya proses reformasi birokrasi dan tata Kelola pajak. Karena dapat diyakini bahwa Sebagian besar pegawai DJP masih bersikap jujur dan berintegritas. Jika dilihat dari jumlah pegawai DJP yang lebih dari 45 ribu pegawai, maka data pegawai yang berisiko itu sangat kecil. Hanya oknum-oknum yang tidak profesional kerja yang tergoda untuk melakukan tindakan tersebut. Masyarakat juga harus bijak dalam menilai dan menganalisis kasus viral yang terjadi, jangan langsung menganggap bahwa semua pegawai DJP itu korupsi karena seperti diketahui Bersama bahwa pajak merupakan darah bagi negara sebagai tubuhnya, sehingga tanpa adanya kerja optimal dari mereka dapat dipastikan negara ini akan “oleng”.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tahapan, tindak lanjut dari pelanggaran dan penyelewengan, dampak yang ditimbulkan, dan pelajaran yang dapat diambil dari kasus Rafael Alun Trisambodo.

METODE PENELITIAN

Pada artikel ini metode penelitian yang digunakan ialah metode studi pustaka atau literature review melalui informasi pada website dan penelitian terdahulu terkait korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan serta penggelapan dana.

PEMBAHASAN

Korupsi dari dahulu sampai saat ini merupakan sebuah permasalahan yang sangat kompleks di Indonesia, permasalahan yang belum dapat di tuntaskan dengan efektif karena setelah satu masalah terselesaikan tidak lama dari itu akan muncul permasalahan baru terkait korupsi yang dilakukan dari berbagai kalangan dan lapisan masyarakat. Korupsi telah menimbulkan kerusakan material yang fantastis nominalnya pada perekonomian suatu negara. Perampasan dan penipisan dana publik seperti itu terjadi hampir semua wilayah negara. Hal tersebut mencerminkan moral yang rendah, sehingga terjadinya keserakahan akan kekayaan yang mengakibatkan korupsi.

Menurut UU No. 31 tahun 1999 UU No. 20 tahun 2001: Setiap orang yang tujuannya adalah untuk menguntungkan dirinya sendiri, orang lain atau menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atau sumber daya yang tersedia karena posisinya yang dapat merugikan perekonomian negara, perekonomian nasional, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara pidananya paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara.

Terkait dengan masalah kebutuhan dan tuntutan ekonomi dan kerjasama ekonomi, masalah struktur atau sistem ekonomi, masalah sistem politik atau budaya, masalah mekanisme pembangunan dan birokrasi yang lemah atau prosedur administrasi (sistem kontrol) yang kompleks di bidang pelayanan publik menyebabkan maraknya kasus korupsi. Kasus-kasus korupsi yang memanasifasikan dirinya dalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan memiliki banyak sisi dan kompleks. Meskipun korupsi bersifat multidimensi dan kompleks, namun ada satu hal yang menjadi penyebab utama terjadinya korupsi, terutama dalam birokrasi, yaitu jabatan atau kekuasaan. (Hafiz 2017)

Dalam praktiknya, istilah transfer pricing sering disebut sebagai upaya untuk mengurangi pajak penghasilan badan dalam perusahaan induk dengan cara mentransfer harga atau keuntungan antar perusahaan dengan cara yang menjadikan penggunaan transfer pricing untuk menghindari pajak sebagai masalah hukum, bahkan pidana. (Irfan 2021)

Diduga Saudara RAT melakukan kejahatan yang merugikan negara yang dikenal dengan transfer Pricing. Kejahatan tersebut dapat dilakukan oleh yang bersangkutan dikarenakan yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Bagian Umum di Kanwil Pada direktorat jendral pajak. Yang diduga merugikan negara hingga mencapai milyaran rupiah.

Pemerintah di Indonesia sudah melakukan berbagai cara dan berbagai upaya untuk mengatasi kasus korupsi, kendati demikian sampai saat ini bagi orang-orang yang akan melakukan korupsi mereka melihat masih adanya berbagai celah untuk bisa melakukan tindakan korupsi. Sama halnya dengan penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo selaku Kepala Pajak yang diduga melakukan korupsi sebesar sekitar 50 miliar rupiah. Hal ini sedang menjadi

trending hangat yang banyak dibicarakan masyarakat karena ketidakmampuan para lembaga negara dalam menjalankan tugasnya dengan amanah. Kasus Rafael Alun Trisambodo berawal dari kasus anaknya yaitu Mario Dandy yang berbuat tindakan aniaya kepada David yang merupakan seorang anak dari seorang pengurus di GP Ansor. Kronologi penganiayaan dimulai ketika pacar Mario yang memberitahu temannya bahwa dia telah dianiaya oleh David (mantan pacarnya). Kemudian teman Mario tersebut memberitahu Mario tentang hal itu. Namun, Mario tidak langsung percaya, Ia kembali bertanya pada pacarnya. Pacarnya pun membernarkan cerita tersebut. Dengan alasan ingin mengembalikan kartu pelajar David, Mario meminta pacarnya untuk menghubungi David. Mario berpikir kalau ia bisa menemui David jika ia melakukan cara tersebut. Setelah David mengirimkan lokasinya pada mantan pacarnya itu yang sekarang merupakan pacar dari Mario Dandy, Mario pun langsung mendatangi tempat tersebut dan mario pun melakukan tindakan penganiayaan yang dilakukan secara berulang kepada David. Mario melakukan tindakan pemukulan, lalu ia menendang pada wajah David, selain itu kepala belakang juga menjadi sasarannya serta leher sampai David tidak sadarkan diri dan harus mengalami koma selama beberapa hari. Akibat yang timbul dari peristiwa itu ialah Mario sekarang menjadi seorang tersangka dan kini harus mendekam di jeruji tahanan Polres Jakarta Selatan. Akhir-akhir ini pun status mario sebagai seorang mahasiswa dicabut setelah Universitas Prasetiya Mulya tempat Mario berkuliah menyatakan bahwa pihak kampus telah membuat keputusan untuk mengeluarkannya. Selain kasus penganiayaan tersebut Mario Dandy juga memamerkan sejumlah barang-barang mewahnya di akun sosial media miliknya.

Hal tersebut membut kecurigaan terhadap polres, sehingga Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap plat nomor kendaraan yang dibawa Mario Dandy sempat diubah sehingga tidak sesuai dengan izin. Plat nomor polisi kendaraan rubicorn yang awalnya B 2571 PBP diubah menjadi B 120 DEN. Kemudian polisi mendalami bukti pajak kendaraan yang ternyata bukti pajak kendaraan tersebut bukan atas nama Mario Dandy melainkan dipalsukan menjadi nama orang lain.

Bermula pada tahun 2008, ketika dia diduga melakukan kecurangan pajak dengan menghindari pembayaran pajak yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaannya. Dia diduga menggunakan berbagai cara untuk menghindari pembayaran pajak, termasuk menggunakan surat jalan palsu dan dokumen palsu yang menyatakan bahwa kayu lapis yang diimpor telah diproses di luar negeri.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena nilai kerugian negara yang cukup besar akibat tindakan korupsi ini. Menurut Kementerian Keuangan, nilai kerugian negara akibat kasus korupsi pajak ini mencapai Rp. 1,4 triliun.

Kasus ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran pajak dalam membiayai kebutuhan negara dan mengatasi ketimpangan sosial di Indonesia. Korupsi pajak dapat mengakibatkan kerugian negara yang signifikan dan menghambat pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia.

Dengan dijatuhkannya hukuman kepada Rafael Alunan Trisambodo, harapan dari dijatuhkannya hukuman kepada Rafael ialah untuk memberi peringatan dan untuk menunjukkan dampak dan hukuman yang diberikan kepada pelaku tindakan korupsi sehingga harapannya di masa depan kasus korupsi dapat diatasi seminimal mungkin atau bisa juga supaya orang dapat mengendalikan dirinya sendiri untuk mencegah dirinya supaya tidak terjerumus ke dalam kasus korupsi. Di samping itu, kasus ini juga bisa menjadi pengingat bagi masyarakat dan perusahaan bahwa membayar pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi demi kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat.

Wajib pajak harus dilakukan dengan teratur dan disiplin karena hal ini sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 ini dilandasi falsafah Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Terdapat potensi tergerusnya kepercayaan public kepada Ditjen Pajak Kemenkeu akibat adanya sebuah kasus tindakan aniaya yang menjalar pada adanya anggapan bahwa ada harta yang tidak wajar dari Rafael Alun Trisambodo. Sehingga diperlukan upaya untuk mengembalikan kembali kepercayaan public terhadap Ditjen Pajak dengan cara melakukan reformasi terhadap birokrasi dan tata kelola pajak. Jumlah harta yang dimiliki Rafael Alun Trisambodo lebih besar dari harta kekayaan atasannya Suryo Utomo dengan jabatannya sebagai seorang Direktur Jenderal Pajak, dan jumlah hartanya mendekati jumlah harta yang dimiliki Sri Mulyani yang menjabat sebagai Menteri Keuangan. Selanjutnya telah dilakukan audit investasi terhadap harta kekayaan yang dimiliki Rafael Alun Trisambodo oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), hasil akhirnya menunjukkan bahwa Rafael Alun Trisambodo telah melakukan tindakan penyembunyian harta serta ia tidak patuh ketika pembayaran pajak.

Padahal dapat dikatakan untuk keseluruhan hasil kinerja dalam hal penerimaan pajak yang dilakukan selama tahun-tahun terakhir ini sudah berangsur membaik, buktinya ialah adanya pencapaian target penerimaan pada sector pajak selama dua kali. Di lain sisi adanya system birokrasi baru di Kementerian Keuangan sudah sangat jauh lebih berasa jikalau system birokrasi ini dibandingkan dengansistem birokrasi pada kementerian serta pada instansi pemerintah lainnya. Salah satunya yaitu adanya reformasi perpajakan melalui UU HPP. Meskipun kinerja DJP tercoreng akibat tindakan yang dilakukan oleh oknum Rafael, tetapi dapat diyakini bahwa dari sebagian besar total keseluruhan pegawai DJP pastinya masih banyak dari mereka yang masih bersikap jujur dan bisa dikatakan berintegritas. Sangat kecil jumlah pegawai pajak yang berisiko

dibandingkan dengan jumlah seluruh pegawai DJP yang mencapai lebih banyak dari 45 ribu orang pegawai yang tersebar diseluruh Indonesia. Janganlah menggeneralisasi bahwa pegawai DJP itu melakukan tindakan korupsi, karena tanpa kerja mereka secara optimal Negara kita akan mengalami kesulitan terutama dibidang ekonomi sebab pajak merupakan darah baginegara sebagai tubuhnya.

Terdapat deretan fakta yang berkembang dari kasus Rafael Alun Trisambodo. Yang pertama yaitu harta kekayaan yang dimiliki Rafael mengalami peningkatan pada 2022, satu diantaranya harta milik rafael yang bertambah ialah kepemilikan daripada mobil dengan merk Toyota Land Cruiser. Tercatat Rafael Alun telah memiliki banyak harta dengan jumlah hartanya mencapai RP 56 miliar dalam LHKPN. Harta kekayaan tersebut terdapat beberapa macam mulai dari kepemilikan bisnis property yang ada di beberapa kota, mobil mewah, dan ada beberapa surat berharga lainnya. KPK beranggapan bahwa harta yang dimiliki Rafael itu sangat tidak logis. Selanjutnya yaitu alasan pengunduran diri Rafael Alun ditolak karena pemeriksaan terhadap yang bersangkutan Rafael masih terus berjalan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan bersama KPK. Harta Rp 56 miliar yang dilaporkan Rafael itu belum termasuk harta yang tidak dilaporkan ke LHKPN. Ternyata banyak harta yang belum dilaporkan dan diklarifikasi oleh Rafael Alun, berupa beberapa kendaraan mewah yang dimilikinya. Di sisi lain Rafael telah mengklain beberapa mobil mewah viral yang di pamerkan oleh keluarganya itu bukanlah miliknya, melainkan milik kakaknya, anaknya, hingga milik menantunya. Fakta terakhir yaitu pacar Mario Dandy jadi pelaku penganiayaan. Pacar Mario Dandy yang berinisial A ditetapkan oleh Polda Metro Jaya sebagai pelaku penganiayaan terhadap D. Setelah sebelumnya polisi juga telah menetapkan Shane teman dari Mario Dandy sebagai tersangka penganiayaan karena telah merekam kejadian penganiayaan tersebut hingga akhirnya videonya viral di dunia maya. Kasus Rafael Alun Trisambodo dan anaknya Mario Dandy telah memicu terjadinya berbagai peristiwa lain, seperti adanya gerakan baru yaitu gerakan setop bayar pajak.

Terkait hal tersebut, ketua KPK Firlil Bahuri juga angkat bicara mengenai status kasus tersebut, menurut dia, lembaga antirasuah masih bekerja sesuai aturan dan masih profesional. Menurut Firlil Bahuri pihaknya masih mencari dan mengumpulkan bukti yang kuat terkait kasus dugaan korupsi Rafael Alun. Dengan bukti tersebut dapat menemukan titik terang peristiwa tersebut. KPK menyatakan akan menyelesaikan penyelidikan kasus dugaan korupsi dalam kepemilikan harta. Rafael menyatakan bahwa harta kekayaan yang dimilikinya dan berbagai sumber dari pendapatannya serta ia juga dapat menjelaskan darimana asal usul perolehan harta kekayaan tersebut. Keterangan juga diberikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis terkait tindakan pemblokiran sejumlah rekening konsultan pajak akibat adanya dugaan pihak tersebut membantu dalam melakukan proses tindak pidana pencucian uang tersebut. Rafael menyatakan bahwa dia tidak pernah menggunakan jasa konsultan pajak. Rafael pun merasa heran dengan adanya

penyelidikan yang dilakukan kepada harta kekayaan miliknya, sebab dia mengaku kalau selalu membuat pelaporan terkait harta kekayaan yang dimilikinya.

Terdapat dugaan bahwa Rafael Alun Trisambodo telah menerima gratifikasi mencapai puluhan miliar rupiah. Jumlah yang disebutkan tersebut mengarah kepada safe deposit box (SDB) yang dimiliki Rafael pada sebuah bank dengan nominal mencapai Rp 37 miliar rupiah dengan mata uang asing yang saat ini sudah diamankan KPK. Uang yang berada di safe deposit box nantinya akan dihadirkan pada saat konferensi pers. Untuk saat ini pihak KPK masih memerlukan perhitungan lebih lanjut terkait dugaan gratifikasi yang sudah diterima Rafael Alun Trisambodo waktu lalu. Jumlah pasti uang dari gratifikasi tersebut belum diketahui secara pasti karena masih dalam proses penghitungan sehingga belum final, namun dapat dikatakan uangnya mencapai puluhan miliar. Takutnya ketika diberitahukan sekarang nominalnya sedangkan penghitungannya belum final nantinya bisa saja nominalnya lebih sedikit atau bahkan lebih besar dari dugaan sementara. Uang yang berada di dalam safe deposit box tersebut adalah bukti permulaan. Pada kasus gratifikasi hal yang paling utama itu penerimaan oleh seseorang yang diduga sebagai pelaku. Jumlah uang yang diterima di dalam safe deposit box hanyalah pintu masuk bagi KPK untuk melakukan penyelidikan lebih mendalam terkait dugaan tindakan korupsi oleh pelaku. Uang gratifikasi yang diterima Rafael telah berjalan sekitar 12 tahun yaitu dari tahun 2011 sampai 2023. Saat ini KPK sudah mengantongi dua buah bukti sebagai permulaan dari dugaan tindakan korupsi. Selanjutnya tim penyidik dari pihak KPK pun telah melakukan tindakan penggeledahan kepada rumah Rafael Alun Trisambodo. Hal tersebut dilakukan dalam rangka untuk mengumpulkan alat bukti yang sekiranya dapat membantu proses penyidikan yang sedang dilakukan KPK.

Akhir-akhir ini Rafael Alun Trisambodo telah merespons terkait berita-berita yang beredar yang menyangkut namanya. Rafael pun buka suara terkait kasus tersebut dan menyatakan bahwa dugaan-dugaan yang dilemparkan kepadanya itu semua tidak benar dan Rafael mengaku bahwa justru ia bingung mengapa ia bisa menjadi tersangka dalam kasus ini. Rafael mengatakan bahwa selama di kantor ia telah mendedikasikan dirinya untuk bekerja dengan baik, serta menjadi mentor yang baik untuk para bawahannya. Selain itu, ia juga mengaku telah jarang melakukan hubungan bersama wajib pajak. Tetapi ia malah justru dituduh sebagai penerima gratifikasi oleh KPK. Rafael juga mengatakan bahwa sejak 2011 ia tidak pernah berhubungan secara langsung terhadap objek pajak. Sejak saat itu ia sudah di manajemen sehingga tidak berhubungan secara langsung dengan pemeriksaan penyidikan. Rafael mengatakan bahwa dirinya rutin untuk melakukan pelaporan terhadap harta yang dimilikinya ke LHKPN KPK sampai 2022 dan ia juga mengatakan bahwa rutin melakukan pelaporan SPT Pajak. Asset terakhir yang didapatkan oleh Rafael itu pada tahun 2009 dan sampai sekarang tidak pernah bertambah, terkait peningkatan harta yang dimilikinya itu karena adanya peningkatan objek pajak di masa sekarang. Rafael menyampaikan bahwa dalam kasus ini ia tidak merasa bersalah sama sekali. Kasus yang muncul akhir-akhir ini bermula ketika

ada kasus tindakan aniaya oleh Mario Dandy kepada David yang mana kasusnya menimbulkan banyak opini negative yang muncul dikalangan masyarakat dan tidak sedikit yang menyudutkan Mario Dandy atas kasus tersebut. Yang akhirnya kasus tersebut merambah ke ayahnya dan ke lembaga tempat Rafael bekerja. Tidak ada yang bisa dilakukan pada saat ini karena sebagai warga negara Rafael hanya bisa mengikuti proses dari kasus yang menyeret namanya, ia hanya berupaya untuk mencari penasehat huskum yang diharapkan dapat menangani kasus ini supaya menjadi seimbang. Rafael juga berjanji bahwa ia akan koorperatif pada saat mengikuti proses hukum dari kasus yang rumit ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menindaklanjuti petunjuk tentang dugaan terlibatnya seorang entertainment dengan inisial R yang mendapat dugaan keterlibatannya dalam sebuah kasus dugaan tindakan suap yang dilakukan eks Direktur Jenderal Pajak (Ditjen) Rafael Alun Trisambodo. Seperti yang telah diketahui ayah dari Mario Dandy Satriyo telah ditetapkan sebagai tersangka karena menerima tip yang disebut telah diterimanya selama 12 tahun. Sementara itu, Kepala Bidang Pelaporan KPK, Ali Fikri mengatakan, KPK pertama kali menerima laporan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait adanya dugaan keterlibatan seorang artis dalam kasus inisial R. KPK telah mengidentifikasi dugaan korupsi mantan Kepala Bagian Umum Kanwil DJP Jakarta Selatan II itu. KPK menaksir Rafael Alun menerima uang hingga Rp 5 miliar. 10 miliar tip antara 2011 dan 2023. Angka tersebut didapat berdasarkan perhitungan peneliti dari barang bukti yang ditemukan peneliti, salah satunya adalah lemari pakaian Rafael Alun Trisambodo. Netizen pun menyebut nama besar Raffi Ahmad sebagai salah satu artis yang dicurigai. Namun, manajer Prio Bagja Anugrah membantah keras hal tersebut. Kemunculan dari seorang pria dengan inisial R ini bermula dari adanya keterangan seorang Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus. Iskandar Sitorus menjelaskan bahwa inisial R yang di sebutkan merupakan seorang laki-laki, dia orang kaya baru yang bertempat tinggal di Kawasan Jakarta serta dia orang yang sangat terkenal. Rafael Alun sendiri memiliki empat orang anak pria dan wanita. Yang terdiri dari Angelina Embun Prasasya, Christopher Dhyaksa Dharma, Mario Dandy Satrio dan anak keempat yang sampai saat ini belum diketahui pasti identitasnya. Angelina sudah menikah dengan pria Bernama Jeremy Imanuel Santoso. Jeremy bekerja sebagai pengurus dari Rans PIK Basketball dengan pendirinya ialah seorang Raffi Ahmad.

Rafael Alun ditangkap setelah diperiksa sebagai tersangka untuk pertama kalinya. Ia mengenakan seragam oranye tahanan KPK. Ditahan di Gedung Merah Putih KPK selama 20 hari pertama hingga 22 April 2023 dalam jumpa pers di gedung KPK (Ketua Komjen KPK Pol Firli Bahuri, Senin, 3 April 2023).

KESIMPULAN

Indonesia sudah melakukan berbagai cara untuk bisa memberantas korupsi yang ada, akan tetapi sampai saat ini hal tersebut belum tercapai karena masih banyak orang yang gila harta dan mereka memanfaatkan kesempatan melalui celah yang ada untuk melakukannya, seperti penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo selaku Jenderal Pajak yang diduga melakukan korupsi sebesar kurang lebih 50 miliar. Jumlah harta yang dimiliki Rafael Alun Trisambodo lebih besar dari harta kekayaan atasannya yaitu bapak Suryo Utomo dengan jabatannya sebagai seorang Direktur Jenderal Pajak, dan jumlah hartanya mendekati jumlah harta yang dimiliki Sri Mulyani yang menjabat sebagai Menteri Keuangan. Selanjutnya telah dilakukan audit investasi terhadap harta kekayaan yang dimiliki Rafael Alun Trisambodo oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), hasil akhir membuktikan bahwa seorang Rafael Alun Trisambodo telah melakukan tindakan menyembunyian harta serta ketidakpatuhan terhadap kebijakan dan aturan perpajakan. Padahal dapat dikatakan secara menyeluruh adanya peningkatan kinerja dari penerimaan di sector pajak yang telah dilakukan selama tahun-tahun terakhir yang sudah berangsur ke arah membaik, buktinya yaitu penerimaan di sector pajak bisa mencapai target selama dua kali. Sangat kecil jumlah pegawai pajak yang berisiko dibandingkan dengan jumlah menyeluruh pegawai DJP yang mencapai lebih banyak dari 45 ribu orang pegawai yang tersebar diseluruh Indonesia. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 ini dilandasi falsafah Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Wajib pajak harus dilakukan dengan teratur dan disiplin karena hal ini sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

OPHIAS KURAUONE, Y. K. (August 2021). THE EFFECTS OF INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS AUDITING AND LEGAL ENFORCEMENT ON TAX EVASION :EVIDENCE FROM 37 AFRICAN COUNTRIES. *Global Finance Journal*, 100561.

Rasyidi, M. A. (2020). KORUPSI ADALAH SUATU PERBUATAN TINDAK PIDANA YANG MERUGIKAN NEGARA DAN RAKYAT SERTA MELANGGAR AJARAN AGAMA. *Jurnal Mitra Manajemen*, 15.

<https://www.liputan6.com/amp/5249405/terbongkar-ciri-ciri-artis-inisial-r-diduga-terlibat-pencucian-uang-rafael-alun-trisambodo>

<https://www.suara.com/entertainment/2023/03/31/123510/raffi-ahmad-diduga-artis-r-yang-terlibat-kasus-pencucian-uang-rafael-alun-begini-kata-sang-manajer>

https://nasional.tempo.co/read/1695542/kasus-penganiayaan-oleh-mario-dandy-satriyo-ini-kronologi-lengkap-dan-motifnya?page_num=2

<https://nasional.tempo.co/read/1699549/kpk-sebut-kasus-kekayaan-tak-wajar-rafael-alun-sudah-masuk-penyelidikan>

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230315110739-4-421816/buntut-kasus-rafael-dirjen-pajak-siap-rombak-cara-pelayanan>

<https://www.nu.or.id/nasional/buntut-kasus-harta-rafael-alun-trisambodo-turunkan-kinerja-perpajakan-kemenkeu-uCCpL>

<https://nasional.tempo.co/read/1698025/4-fakta-terkini-rafael-alun-trisambodo-dan-perkembangan-kasusnya>

<https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/63f876ed892a7/kronologi-kasus-rafael-alun-trisambodo-hingga-dicopot-sri-mulyani>

<https://nasional.kompas.com/read/2023/03/30/18112241/rafael-alun-trisambodo-diduga-terima-gratifikasi-hingga-puluhan-miliar>

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6647332/kini-berstatus-tersangka-kpk-rafael-alun-trisambodo-buka-suara>

<https://www.kilat.com/nasional/8448285402/saking-bandelnya-rafael-alun-trisambodo-muak-dengan-kelakuan-mario-dandy-satriyo-saya-sudah-berkali-kali>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230330103534-12-931196/kpk-dikabarkan-tetapkan-rafael-alun-tersangka-kasus-gratifikasi>

Adidi Yogia, R. I. (2017). ABUSE OF POWER:TINJAUAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN OLEH PEJABAT PUBLIK DI INDONESIA. *PUBLIKA*, Vol 3, No. 1 Hal. 80-88 (2017), 9.

Irfan, R. M. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Penyalahgunaan Transfer Pricing untuk Penghindaran Pajak. 201/ *INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES*, 17.